

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama beberapa dekade terakhir ini, para ilmuwan dan pembuat kebijakan baik di negara maju maupun negara berkembang telah menyadari bahwa *financial literacy* pengusaha sangat penting untuk pembentukan dan kelangsungan usaha kecil (Wise, 2013). Literasi keuangan merupakan salah satu prinsip kunci kewirausahaan yang akan membantu pengusaha dalam mengambil keputusan dan melakukan aktivitas yang memiliki konsekuensi keuangan. Hal ini disebabkan karena pengusaha beroperasi di lingkungan yang dinamis dimana pasar keuangan lebih kompetitif dan portofolio yang kompleks. Pengusaha akan menjadi rentan terhadap asimetri informasi jika kompleksitas di pasar keuangan tidak sepadan dengan pertumbuhan *financial literacy* yang dimiliki oleh pengusaha (Barte, 2012). Ketika *financial literacy skill* di kalangan pengusaha rendah, maka ini akan menjadi penghalang dalam mencapai kesuksesan usaha.

Perspektif manajerial berwirausaha mendefinisikan pengusaha sebagai orang yang mengatur, mengelola dan mengendalikan secara aktif urusan unit / perusahaan yang menggabungkan faktor produksi untuk penyediaan barang dan jasa. Sementara *literacy* didefinisikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis, pengetahuan serta kompetensi di wilayah tertentu (OECD, 2000). Seorang pengusaha yang memiliki pengetahuan keuangan (*financial literacy*) akan tahu pilihan pembiayaan dan pengelolaan keuangan yang paling sesuai untuk bisnisnya di berbagai tahap pertumbuhan bisnisnya, serta tahu di mana mendapatkan produk dan layanan yang paling sesuai untuk bisnisnya (USAID, 2013). Agar pelaku usaha dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, pelaku usaha harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraannya. Dengan mengetahui pembiayaan dan pengelolaan keuangan yang baik maka

pengusaha dapat terhindar dari aktivitas investasi keuangan yang tidak jelas dan mendapatkan manfaat dari produk dan jasa layanan keuangan yang dipilih.

Berman *et al.*(2008) menyatakan literasi keuangan pengusaha akan membantu dalam mengelola sumber daya dengan lebih bijak, menggunakan informasi keuangan dengan lebih cerdas sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan mereka. Literasi keuangan juga meningkatkan partisipasi di pasar keuangan yang memfasilitasi akumulasi aset dan perataan konsumsi dan menyediakan akses ke sumber pendanaan yang lebih luas (Van Rooj *et al*, 2011). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nunoo *et al*, (2010) juga menyatakan bahwa *financial literacy* mempengaruhi keseluruhan akses dan pemanfaatan berbagai layanan keuangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Ghana. Selain itu Wachira *et al* (2012) meneliti dampak *financial literacy* atau literasi keuangan terhadap akses terhadap layanan keuangan oleh UKM di Kenya dan menetapkan bahwa *financial literacy* yang rendah akan menghambat akses terhadap layanan keuangan.

Akses keuangan atau *financial access* didefinisikan sebagai kemampuan individu, rumah tangga, pengusaha dan perusahaan untuk mengakses dan memanfaatkan berbagai layanan keuangan jika mereka memilih untuk melakukannya (Rojas-Suarez *et al.* 2010). Akses keuangan atau *financial access* merupakan penentu penting kinerja usaha mikro karena memberi mereka modal kerja, mendorong inovasi dan dinamisme perusahaan yang lebih kuat, meningkatkan kewiraswastaan, mendorong alokasi aset yang lebih efisien dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan (Beck *et al.* 2006) . Dengan menyediakan akses yang luas terhadap keuangan bagi perusahaan yang layak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Akses finansial meningkatkan penyertaan keuangan sehingga berkontribusi terhadap pendalaman sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui inklusi keuangan bertujuan untuk menarik masyarakat ke dalam sistem keuangan formal agar mereka dapat

mengakses berbagai layanan keuangan termasuk tabungan, pembayaran, transfer uang dan kredit dan asuransi (Hannig *et al.* 2010).

Inklusi keuangan juga mengarah pada pendalaman keuangan yang mendorong investasi, pertumbuhan, pengentasan kemiskinan dan produktivitas faktor total dalam perekonomian (Atkinson *et al.*, 2012). Penyertaan keuangan usaha kecil akan mengurangi kendala likuiditas, mendorong investasi yang pada gilirannya mempengaruhi struktur industri, ukuran perusahaan, dan persaingan dalam ekonomi (Beck *et al.* 2007). Ukuran akses finansial yang umum mencakup kepemilikan akun, pemanfaatan berbagai layanan keuangan dan kemampuan untuk memperoleh layanan dari berbagai penyedia layanan keuangan.

Dalam hal tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, diperlukan penguatan akses keuangan UKM kepada sektor perbankan dengan beberapa program perbankan seperti : penyaluran kredit, *branchless banking*, dan tabungan, serta edukasi keuangan yang diharapkan dapat memberikan modal kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja usaha yang dilakukan.

Data Kementerian Keuangan Indonesia (2015) juga menyebutkan di Indonesia terdapat sekitar 57,9 juta pelaku UKM. Sementara itu berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2015 menyatakan bahwa penyaluran kredit untuk UKM hanya mencapai sebesar 18% dari total kredit (hanya Rp 635 Triliun dari total kredit Rp3.500 Triliun). Menurut pihak OJK nilai tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha UKM. Hal ini berarti para pelaku usaha masih rendah dalam mengakses dan memanfaatkan layanan perbankan dalam mengembangkan usaha miliknya.

Pada tingkat makro ekonomi, usaha kecil merupakan tulang punggung perekonomian. UKM memiliki peran penting bagi pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sebagaimana pernyataan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016) yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di kawasan Asia yang pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998, dan sektor yang tetap bertahan adalah sektor Usaha Kecil dan Menengah. Dengan adanya sektor UKM

pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap bisa memulai usaha melalui penciptaan lapangan kerja baru bagi penduduk Indonesia.

Sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, UKM menyediakan lapangan kerja, menyediakan hubungan pasar di berbagai sektor, mempromosikan inovasi, mengurangi kemiskinan dan memberikan kontribusi terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) baik di negara maju maupun negara berkembang (Cole *et al.* 2010). Keberadaan UKM di Indonesia tidak bisa dipungkiri merupakan suatu badan usaha yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2016), kontribusi UKM terhadap *Product Domestic Bruto* (PDB) di Indonesia adalah sebesar 60,34%.

Selain itu, UKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja dalam negeri dengan kontribusi yang meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% dalam periode 5 tahun terakhir. Proporsi UKM yang lebih dari 80% telah membuat UKM menjadi salah satu penunjang yang memiliki eksistensi terhadap perekonomian di Indonesia.

Walaupun UKM Indonesia memiliki peranan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional. Namun kenyataannya masih banyak masalah yang menghadang dalam pengembangannya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh UKM saat ini adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana UKM diharapkan mampu menjadi kunci utama Indonesia dalam bersaing di pasar global. Oleh karena itu manajemen yang kuat dalam pengolahan keuangan harus dimiliki oleh UKM.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi oleh UKM adalah masalah yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Abor dan Quartey (2010) mengatakan UKM sering mengalami keterlambatan dalam pengembangannya, hal ini dikarenakan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas (*closed loop problems*), seperti masalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kepemilikan, pembiayaan, dan pemasaran. Hal ini menyebabkan UKM sulit bersaing dengan perusahaan - perusahaan besar.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis guna meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UKM. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkaya pengetahuan pelaku UKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik (Aribawa, 2016).

Dahmen dan Rodriguez (2014) menyatakan bahwa diperlukan pemahaman tingkat literasi keuangan bagi pelaku usaha terutama untuk penyusunan laporan keuangan usahanya yang berguna untuk mencari pendanaan. Lebih jauh mereka juga menyatakan bahwa pentingnya pemilik usaha memahami pengetahuan keuangan guna memiliki kinerja perusahaan yang lebih bagus, sehingga memungkinkan UKM mengalami pertumbuhan bisnis.

Sebuah survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (2016) bahwa pemahaman literasi keuangan terhadap penduduk Indonesia hanya 22%. Bank Indonesia (2016) juga mengungkapkan bahwa UKM di Indonesia memiliki pengetahuan tingkat literasi keuangan terhadap pengelolaan bisnis tergolong rendah. Otoritas Jasa Keuangan (2016) mengungkapkan bahwa jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia adalah yang paling besar dibandingkan dengan negara - negara lain, akan tetapi Indonesia merupakan Negara dengan tingkat literasi keuangan tergolong rendah.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat tahun 2016, terdapat 501.600 UKM yang ada di Sumatera Barat yang tersebar di 19 kabupaten dan kota. Sedangkan untuk kota Padang sendiri terdapat 74.000 lebih UKM yang tersebar di 11 kecamatan.

Terdapat berbagai macam sektor UKM di Kota Padang diantaranya sektor dagang, jasa, kerajinan dan kuliner. Namun UKM sektor dagang telah menjadi salah satu sektor UKM yang unggul dibanding dengan UKM sektor lainnya. Sebagai kota pusat pemerintahan Sumatera Barat, Kota Padang telah menjadi salah satu sentral bisnis yang mendorong pertumbuhan UKM sektor dagang dengan pesat.

Tabel 1.1
Jumlah Usaha Perdagangan menurut Skala Usaha di Kota Padang

Tahun	Mikro	Kecil	Menengah
2012	864	26.845	12.168
2013	994	27.605	12.308
2014	1.162	28.685	12.531
2015	1.298	29.861	12.819
2016	1.329	30.121	12.873

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2018

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah usaha perdagangan di Kota Padang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik untuk jenis usaha dagang yang tergolong mikro, kecil maupun menengah. Melihat hal tersebut UKM sektor dagang memiliki peranan yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Pertumbuhan usaha perdagangan yang pesat ini mengindikasikan bahwa UKM sektor dagang di Kota Padang memiliki kinerja yang baik.

Studi empiris terbaru telah mengidentifikasi literasi keuangan pengusaha sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja usaha kecil (Njoroge, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Siekei dkk (2013) tentang pengaruh pendidikan literasi keuangan terhadap kinerja perusahaan kecil di Kenya dan menetapkan bahwa pelatihan dalam analisis keuangan, penganggaran dan manajemen kredit meningkatkan kinerja usaha kecil. Sementara itu Njoroge (2013) mempelajari hubungan antara literasi keuangan dan kesuksesan pengusaha di kalangan UKM di Nairobi City County, Kenya dan menetapkan bahwa literasi keuangan mempengaruhi Kinerja UKM. Sedangkan Barte (2012) mempelajari pengaruh *financial literacy* terhadap usaha mikro di subsektor perikanan di Filipina dan menetapkan bahwa penjual ikan memiliki tingkat pengetahuan keuangan yang rendah berdampak negatif terhadap usaha mereka. Olawale dan Garwe (2010) dalam penelitiannya di sebuah UKM di Afrika menemukan bahwa pemahaman literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan UKM dan kinerja UKM.

Penelitian tentang *Financial Literacy* telah banyak dilakukan terutama tentang literacy keluarga dan mahasiswa, namun masih jarang diterapkan pada UKM terutama pada negara berkembang seperti Indonesia . Oleh karena itu peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UKM Kota Padang. Adapun sektor UKM yang akan diteliti yaitu UKM sektor dagang. Hal ini disebabkan karena UKM sektor dagang merupakan UKM yang memiliki tingkat pertumbuhan yang pesat di Kota Padang dibandingkan dengan UKM sektor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh *Financial Literacy* dan *Financial Access* terhadap Kinerja UKM di Kota Padang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *Financial Literacy* terhadap *Financial Access* pada pelaku UKM sektor dagang di Kota Padang?
2. Bagaimana pengaruh *Financial Literacy* terhadap Kinerja UKM sektor dagang di Kota Padang ?
3. Bagaimana pengaruh *Financial Literacy* terhadap Kinerja UKM melalui *Financial Access* pada UKM sektor dagang di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji secara empiris pengaruh *Financial Literacy* terhadap *Financial Access* pada pelaku UKM sektor dagang di Kota Padang.
2. Menguji secara empiris pengaruh *Financial Literacy* terhadap Kinerja UKM sektor dagang di Kota Padang
3. Menguji secara empiris pengaruh *Financial Literacy* terhadap Kinerja UKM sektor dagang melalui *Financial Access* di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Manfaat akademis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi.

2. Manfaat praktis

a) Diharapkan dari penelitian ini mampu membantu UKM dalam membuat keputusan manajemen dan keuangan yang tepat untuk peningkatan kinerja usaha.

b) Diharapkan dari penelitian ini muncul dukungan yang signifikan dari pemerintah dan pihak terkait lainnya demi mendorong pengembangan literasi keuangan dan akses keuangan pada pelaku UKM.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mencegah perluasan dan terjadinya kerancuan pembahasan, maka penulis membatasi konteks penelitian dengan fokus hanya kepada pengaruh *financial literacy* kinerja UKM dengan *financial access* sebagai variabel intervening atau pemediasi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menguraikan dalam lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang konsep-konsep dasar dari penelitian ini, diantaranya latar belakang masalah yang akan diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini penulis menguraikan tinjauan teori yang menjadi dasar bagi pembahasan penelitian, penelitian - penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok bahasan, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode - metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya: desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel dan definisi operasional variabel, dan metode analisis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang kajian analisis dan pembahasan dari data-data yang telah dikumpulkan dan diolah guna mendapatkan jawaban dari hipotesis yang di ajukan. Bab ini emuat analisis hasil penelitian mengenai masalah yang dibahas yaitu tentang pengaruh *financial literacy* dan *financial access* terhadap kinerja UKM.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian, keterbatasan dan memberikan masukan atau saran bagi penelitian selanjutnya.

